



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 216741

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **9.706.727.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/125 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 596.412.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 605 m2/472 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.229.327.000
3. Tanah Seluas 31 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 174.375.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/370 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 3.899.675.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.806.938.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **397.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BPV A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **121.110.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	780.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.820.000.000
Sub Total	Rp.	12.824.837.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.824.837.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.